



Penjaminan

# MUTU

## DI PERGURUAN TINGGI ISLAM

*Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi*

editor:  
Muhammad In'am Esha

**Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Islam  
Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi**

© UIN-Maliki Press, 2016

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

*All Right Reserve*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagai atau seluruh

Isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Editor: Muhammad In'am Esha

Layouter: @neiyarahayu

UMP 16002

ISBN 978-602-1190-62- 3

Cetakan I: Desember 2016

Diterbitkan pertama kali oleh

UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI)

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Telepon/Faksimile +62341573225

Email: [uinmalikipress@gmail.com](mailto:uinmalikipress@gmail.com)

Website: <http://www.uin-malang.ac.id>



# DAFTAR ISI

PENGANTAR REKTOR.....	iii
PENGANTAR EDITOR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi

## Bagian Pertama

### RANAH IDEALITAS DAN KONSEPTUAL

#### PENJAMINAN MUTU MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY

Menjadikan Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Menang Bersaing <i>Imam Suprayogo</i> .....	3
Penjaminan Mutu: Ikhtiar Mempersiapkan UIN Maliki Malang Menuju <i>World Class University</i> (WCU) <i>Muhtadi Ridwan</i> .....	15
Transformasi Bisnis Perguruan Tinggi Islam Menuju Cita <i>World Class University</i> <i>Sugeng Listyo Prabowo</i> .....	21
Konsep Manajemen Mutu Pendidikan dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir <i>Maudhu'i</i> ) <i>Baharuddin</i> .....	43
Penjaminan Mutu dan Ideologi Perguruan Tinggi Islam <i>Halimi Zuhdy</i> .....	59

**Bagian Kedua**  
**RANAH FILOSOFIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN**  
**PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU**

Falsafah Kebijakan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi <i>Muhammad In'am Esha</i> .....	73
Menjaga <i>Khittah</i> Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Perang Mutu Kelembagaan <i>Mohammad Miftahusyaian</i> .....	87
Kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai Kreator Mutu <i>Angga Teguh Prastyo</i> .....	97
Urgensi Manajemen Berbasis Mutu pada Lembaga Pendidikan Islam <i>Nurul Yaqien</i> .....	105
<i>The Unity of Knowledge</i> pada Sistem Pendidikan Islam <i>Aniek Rahmaniah</i> .....	131

Pendidikan Tinggi Bermutu Berbasis Keunikan Individu (Inspirasi dari Paradigma Kecerdasan Jamak) <i>Abdul Halim Fathani</i> .....	143
---	-----

**Bagian Ketiga**  
**RANAH SISTEM MANAJEMEN**  
**PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU**

Model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi <i>Slamet</i> .....	161
Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Islam Melalui <i>Self - branding</i> dan <i>Benchmarking</i> <i>Daniel Hilmi</i> .....	187

Mewujudkan Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam <i>Mulyono</i> .....	209
Membangun Pendidikan Tinggi Islam Berbasis Mutu <i>Mujtahid</i> .....	229
Relasi Penjaminan Mutu dan Kepemimpinan <i>Muh.Hambali</i> .....	255
Sistem Manajamen Mutu Penilaian Terstandar Berbasis Ulul Albab <i>Alfin Mustikawan</i> .....	279
<b>Bagian Keempat</b>	
<b>RANAH SOSIAL PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU</b>	
Menakar Konsep Standar Kualitas Perguruan Tinggi Islam <i>Abdul Malik Karim Amrullah</i> .....	295
Devaluasi Mutu Lulusan Perguruan Tinggi: Sebuah Refleksi atas Pemikiran Para Rektor <i>Taufiq</i> .....	305
<i>Trend Global Pendidikan IPS:</i> Tujuan dan Kerangka Dasar Kurikulum di Era ASEAN Community <i>Abdul Bashith</i> .....	313
Peningkatan Mutu Pembelajaran Anak Usia Dini Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Era MEA <i>Muhammad Samsul Ulum</i> .....	335
Kualitas Pendidikan Nasional & <i>Full Day School Program</i> <i>Syaiful Mustofa</i> .....	349

Quality Assurance For Study Program Of Islamic Higher Education: What Should We Do Properly? <i>M. Zaini Miftah</i> .....	379
--	-----

**Bagian Kelima**  
**RANAH PRAKTIK PENGEMBANGAN**  
**PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM**

Manajemen Mutu Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah sebagai Pilar Pengembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia <i>Abdul Wahab Rosyidi</i> .....	393
--	-----

Strategi Pencapaian Mutu Akademik Melalui Pendekatan <i>SPICES</i> dalam Kurikulum Pendidikan Kedokteran di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang <i>Ermin Rachmawati dan Nurlaili Susanti</i> .....	411
--	-----

<i>Tracer Study</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang <i>Linda Salma Angreani</i> .....	421
---	-----

Strategi Membangun Budaya Mutu di Perguruan Tinggi Islam <i>M. Fahim Tharaba</i> .....	437
---	-----

<i>Total Quality Management In Education (TQME)</i> dalam Peningkatan Mutu Lulusan Perguruan Tinggi <i>Indah Yuliana</i> .....	457
--	-----

تعزيز منظومة ضمان جودة التعليم العالي في الجامعات الإسلامية الإندونيسية ودورها في موازنة معايير مؤشراتعالمية الجامعة برهان الدين أماك & تري يو سوفري يتنو.. 467 .....	
--	--



# FALSAFAH KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU DI PERGURUAN TINGGI

Muhammad In'am Esha

Email: muhammadinamesha@uin-malang.ac.id

## A. Pengantar

Akhir-akhir ini penjaminan mutu (*quality assurance*) menjadi hal yang penting. Ia menjadi isu yang sangat menarik. Penjaminan mutu telah menjadi perhatian dan fenomena yang meluas bagi masyarakat dunia. Tidak heran jika Skolnik menyatakan '*quality assurance in higher education has became a major phenomenon worldwide*'.<sup>1</sup> Dalam catatan Skolnik dicontohkan bahwa *International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education* (INQAAHE) yang pada tahun 1991 baru dimulai dengan 9 anggota, saat ini sudah lebih dari 2000 lembaga pendidikan tinggi dunia yang tergabung di dalamnya. Hal ini menunjukkan betapa perhatian masyarakat dan lembaga pendidikan semakin besar terkait dengan penjaminan mutu.

Perhatian dan signifikansi penjaminan mutu yang sedemikian besar telah mendorong banyak pihak bergerak untuk lebih jauh mengetahui dan menggali aspek-aspek yang terkait dengan penjaminan mutu. Banyak aspek yang sebenarnya bisa di bahas oleh masyarakat terkait dengan penjaminan mutu ini. Kalau kita merujuk pada tipe persoalan yang dibuat oleh Muhammin, maka kita bisa mengajukan beragam pertanyaan baik yang masuk dalam kategori *fundamental problems, structural problems,*

---

<sup>1</sup> Michael L. Skolnik. "Quality Assurance in Higher Education as a Political Process". *Journal of Higher Education Management and Policy*. Vol. 22/1, 2010. Hlm. 69.

*dan operational problems.*<sup>2</sup> Fundamental problem dimaksudkan sebagai persoalan-persoalan yang bersifat pondasi (fundamental). Persoalan ini bisa berkenaan dengan aspek filosofis penjaminan mutu. Sedangkan *structural problem* dimaksud sebagai persoalan yang bersifat stuktural berkenaan dengan berbagai aspek *structural* penjaminan mutu seperti penjaminan mutu di berbagai jenjang pendidikan, penjaminan mutu pada masyarakat pendes dan perkotaan. Sedangkan, *operational problem* berkenaan dengan persoalan teknis operasional penjaminan mutu.

Tulisan ini bersifat *fundamental problems*. Hal ini tidak lain karena tulisan ini hendak mengetengahkan diskursus berkenaan dengan filsafat. Secara berturut-turut tulisan ini membahas tentang falsafah kebijakan, kebijakan penjaminan mutu, falsafah kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi, dan diakhiri dengan penutup.

## B. Filsafat dan Falsafah Kebijakan

### 1. Perihal Filsafat dan Kebijakan

Sebelum membincang tentang filsafat kebijakan, ada baiknya kita mereview tentang pemahaman filsafat. Istilah filsafat dalam Bahasa Indonesia diadopsi dari kata *falsafah* (Bahasa Arab) dan *Philosophy* (Bahasa Inggris). Asal kata tersebut baik dari Bahasa Arab maupun Bahasa Inggris kesemuanya merujuk pada kata yang berasal dari Bahasa Yunani, *Philosophia*. Secara kebahasaan, kata ini seringkali dimaksudkan sebagai ‘cinta kebijaksanaan’ (*love of wisdom*) karena kata tersebut dibentuk dari kata *philos* (artinya: cinta) dan *sophos* (artinya kebijaksanaan).<sup>3</sup>

Sedangkan mengenai kata kebijakan dan/atau kebijaksanaan berasal dari Bahasa Inggris *policy*. Sengaja penulis sebutkan kebijakan dan/atau kebijaksanaan hal ini tidak lain karena terdapat dua paham yang berbeda dalam mengartikan kata *policy* tersebut. Pertama, kelompok yang berpandangan bahwa kata kebijakan (*policy*) lebih tepat diistilahkan dengan kata kebijaksanaan. Jadi, menurut paham ini kata *policy* diartikan dengan istilah kebijaksanaan. Kedua, kelompok yang berpandangan bahwa kata yang tepat untuk menerjemahkan kata *policy* adalah kebijakan. Jadi, menurut paham ini *policy* sama dengan kebijakan.

2 Prof. Dr. H. Muhamimin, MA, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

3 Muhammad In'am Esha, *Menuju Pemikiran Filsafat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Paham pertama yang berpendapat bahwa *policy* sama dengan kebijaksanaan antara lain muncul dalam buku yang ditulis oleh almarhum Prof. Dr. M. Irfan Islamy, M.PA. berjudul *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*.<sup>4</sup> Meskipun dalam buku ini tidak dijelaskan perbedaan kebijaksaan dan kebijakan, tetapi melalui judul buku yang ditulisnya jelas memberikan pemahaman bahwa kata *policy* diterjemahkan dengan kebijaksanaan bukan kebijakan.

Ali Imron dalam bukunya yang berjudul *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia* memberikan penjelasan yang relatif jelas tentang penerjemahan kata *policy* menjadi kebijaksanaan dan bukan kebijakan. Menurutnya, terjadinya perbedaan pandangan penerjemahan kata *policy* menjadi kebijaksanaan dan kebijakan karena belum adanya kesepakatan. Namun demikian, Ali Imron berpendapat bahwa penerjemahan yang tepat kata *policy* adalah kebijaksaan. Sedangkan, kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata *wisdom*.

Alasan yang dikemukakan di antaranya adalah: (1) Hampir semua ahli yang menulis buku di bidang ini mengartikan *policy* sebagai kebijaksanaan. Seperti Prof. Irfan Islamy; (2) semua aturan-aturan pemerintah yang perumusannya melibatkan banyak ahli, termasuk ahli kebijaksanaan, ahli *policy* menerjemahkan *policy* menjadi kebijaksanaan; jika sebagian besar ahli di bidang *policy science* yang berkapasitas sebagai ilmuwan dan praktisi menerjemahkan demikian; demikian juga pemerintah yang membuat aturan-aturan menyebut istilah kebijaksanaan, kiranya penerjemahan istilah *policy* dengan kebijaksanaan adalah lebih dapat diterima.<sup>5</sup>

Meskipun demikian, tatkala kata *policy* dikaitkan dengan kata *philosophia* yang diterjemahkan dengan *love of wisdom*, cinta kebijaksanaan sebagaimana yang banyak dipakai dalam literatur filsafat, maka penerjemahan kata *policy* dengan kebijakan juga memiliki dasar rasional penggunaannya dalam tradisi akademik. Belum pernah penulis menemukan pemahaman kata *philosophia* yang pahami sebagai *love of*

4 M. Irfan Islamy. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

5 Ali Imron. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 16.

*wisdom* diterjemahkan dengan cinta kebijakan.<sup>6</sup> Kiranya hal inilah yang mendorong kata *policy* diterjemahkan dengan kata kebijakan seperti *public policy* diterjemahkan dengan kebijakan publik, bukan kebijaksanaan publik. Banyak sekali literatur mutakhir dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah kebijakan publik dibandingkan kebijaksanaan publik. Pergeseran semacam ini dapat dicermati dari penggunaan istilah oleh Prof. Solichin A. Wahab yang pada tahun 1990an menulis buku dengan judul *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, namun pada menjelang tahun 2000an lebih menggunakan istilah kebijakan publik seperti dalam beberapa bukunya antara lain: *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Praktik* (1999), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2008), dan *Evaluasi Kritis: Reorientasi Evaluasi Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial* (2011). Dalam konteks semacam inilah penulis lebih cenderung menggunakan kebijakan sebagai terjemahan kata *policy* sebagaimana yang saat ini populer digunakan dalam berbagai literatur mutakhir.

Apa perbedaan penggunaan istilah kebijakan dan kebijaksanaan? Terlepas dari pendefinisian kebijakan (*policy*) sebagaimana yang termaktub dalam berbagai literatur, secara sederhana dalam kaitannya dengan pembahasan tentang kebijaksanaan (*wisdom*), kebijakan merupakan aturan yang mengikat secara menyeluruh, kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Pemahaman ini sangat dekat dengan makna kata *policy* yang dekat dengan kata *politic*, *polis*, dan *policies*. Hardiman menjelaskan bahwa kata *polis* merupakan asal atau akar dari kata politik dan publik.<sup>7</sup> Tidak mengherankan jika kata *policy* memiliki makna aturan yang bersifat umum (publik). Sedangkan, kata kebijaksanaan (*wisdom*) memiliki makna yang berkebalikan yaitu suatu ketentuan yang bersifat khusus. Kebijaksanaan adalah suatu kearifan pimpinan kepada masyarakat yang memberikan pengecualian pemberlakuan peraturan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, tidak heran jika kebijaksanaan seperti ini memerlukan pemikiran yang mendalam dan komprehensif agar kebijaksanaan atau kearifan tersebut benar-benar tepat.

Lantas, apa hubungannya filsafat dan kebijakan? Atau, apakah perlu kajian filosofis terkait dengan kebijakan? Tinjauan kebijakan secara

6 K. Bertens. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999, hal. 17.

7 F. Hardiman. *Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 2010, hal. 3.

filosofis merupakan hal yang menarik. Meskipun, harus diakui bahwa merelasikan filsafat dan kebijakan adalah sesuatu yang jarang dilakukan. Kalau kita *searching* di internet, belum banyak ditemukan tema kajian filsafat dan kebijakan. Berkenaan dengan hal ini, ada baiknya perlu penulis uraikan pendasaran filosofis terkait dengan kebijakan.

Kalau kita merujuk definisi kebijakan yang dalam beberapa literatur, maka dapatlah dipahami bahwa kebijakan adalah pilihan aktivitas atau tindakan pemerintah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Dye bahwa kebijakan adalah “*whatever governments choose do or not to do*”, apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.<sup>8</sup> Pilihan tindakan (*action*) aktor pemerintah itu ada dua: memilih untuk melakukan (*do*) dan memilih untuk tidak melakukan (*not to do*). Definisi ini memperoleh kritik dari Solichin A. Wahab karena menurut Beliau terdapat perbedaan yang besar antara yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah. Meskipun demikian, Beliau beranggapan bahwa pemahaman yang dikemukakan Dye ini cukup memadai.<sup>9</sup>

Kebijakan sebagai tindakan aktor pemerintah, maka bisa diandaikan bahwa suatu tindakan kebijakan tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek yang menjadi dasar pemikiran sebuah tindakan kebijakan itu dilakukan, bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan, dan untuk apa sebuah kebijakan tertentu dipilih. Pendek kata sebuah aksi kebijakan tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek fundamentalnya. Terlebih, kalau kita merujuk berkenaan dengan teori tindakan (*action*) bahwa tidak ada tindakan yang tidak dipengaruhi oleh nilai, falsafah hidup, dan juga *worldview* tertentu.

Membahas persoalan falsafah kebijakan, meminjam istilah Prof. Solihin A. Wahab, merupakan pembahasan yang bersifat *metapolicy*. *Metapolicy* mempersoalkan mengapa sebuah kebijakan tertentu dipilih untuk diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Lebih lanjut Prof. Solichin A. Wahab menegaskan:

*Metapolicy* memfokuskan diri pada persoalan-persoalan yang agak bersifat filosofis (dan politis) ketimbang masalah-masalah yang bersifat teknis-administratif, semisal menjabarkan tujuan-tujuan kebijakan dalam

8 Thomas Dye. *Policy Analysis*. Alabama: The University of Alabama Press. 1972.

9 Prof. Solichin A. Wahab. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005: 4.

prosedur-prosedur rutin administrasi dan birokrasi.<sup>10</sup>

Falsafah kebijakan mengajak kita untuk masuk dalam aspek substansi, perspektif, sikap, nilai, dan bahkan aspek yang “tersembunyi” dari sebuah kebijakan. Tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa amat sedikitlah para ahli ilmu sosial di Indonesia yang rajin menulis tentang persoalan ini. Hal ini tidak lain karena falsafah kebijakan tidak berada dalam ruang praktis implementatif kebijakan, tetapi lebih bersifat “teoretik”.

### C. Kebijakan Penjaminan Mutu

Kebijakan penjaminan mutu dimaksud dalam konteks ini adalah kebijakan penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, lingkup kajian masuk dalam konteks kebijakan pendidikan. Sebelum lebih jauh membahas tentang kebijakan pendidikan dan kebijakan penjaminan mutu pendidikan ada baiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu pendidikan.

Pendidikan pada hakikatnya setidaknya mengandung tiga unsur utama yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Dalam pemahaman yang pertama, pendidikan dipahami sebagai *tarbiyah*. Menilik asal katanya, *tarbiyah* berasal dari kata *rabba-yurabbi-tarbiyat* yang artinya memelihara dan mengembangkan. Pendidikan dalam makna seperti ini dimaksudkan bahwa pendidikan merupakan wahana untuk memelihara dan mengembangkan potensi yang dimiliki manusia. Memelihara potensi berarti melalui pendidikan potensi manusia dapat terpelihara dari kerusakan dan ketidakbaikan. Demikian juga dengan mengembangkan potensi berarti pendidikan dimaksudkan agar potensi-potensi baik yang dimiliki manusia dapat berkembang.

Dalam pemahaman yang kedua, pendidikan adalah *ta'lim*. Kata *ta'lim* berasal dari kata *allama-yuallimu-ta'liman* yang berarti mengajarkan. Dari kata ini keluarlah kata *'ilm*. Pendidikan dalam pemahaman seperti ini berarti pendidikan harus bisa menjadi sarana untuk transfer pengetahuan dan nilai (*transfer of knowledges and values*). Di sinilah pendidikan dipahami sebagai proses pembelajaran dan pengajaran.

Dalam pemahaman yang ketiga, pendidikan adalah *ta'dib*. *Ta'dib* berasal dari kata *addaba-yuaddibu-ta'diban* yang artinya berbudaya, ber-

---

10 Prof. Solichin A. Wahab. *Ibid.* 45.

*akhlaqulkarimah*. Pendidikan dengan demikian harus membawa peserta didiknya menuju sosok yang berbudaya dan ber-*akhlaqulkarimah*. Menjadi manusia yang berbudaya meniscayakan sebuah upaya pengembangan rasio/pikiran. Hal ini tidak lain karena kata budaya berasal dari kata *budhaya* yang merupakan akronim dari kata *budhi* dan *daya*. *Budhi* artinya pikiran, dan *daya* artinya kemampuan. Oleh karena itu, berbudaya maksudnya adalah sosok yang mampu menggunakan akal pikirannya sebaik-baiknya. Dalam konteks inilah budaya penulis artikan secara sederhana sebagai etos penggunaan rasio manusia atau etos kreativitas. Selain itu, kata *budhaya* kalau dalam bahasa Arab adalah *addaba* yang berarti ber-*akhhlakulkarimah*. Oleh karena itu kata ini mengandung unsur penggunaan kata yang berarti ‘akal pikiran’ dan ‘akhhlak yang mulia’.

Kebijakan pendidikan pada hakikatnya adalah pertimbangan atau pengambilan keputusan yang didasarkan atas sistem nilai yang dijadikan dasar dalam perencanaan dan operasionalisasi untuk mencapai tujuan pendidikan.<sup>11</sup> Oleh karenanya, kebijakan pendidikan harus mampu mengembangkan potensi manusia sebaik-baiknya, melalui proses transfer pengetahuan dan nilai agar mampu mengembangkan akal pikirannya secara kreatif dan ber-*akhlaqulkarimah*.

Sedemikian penting persoalan pendidikan ini, tidak heran jika perlu ada jaminan kualitas atau mutu yang terstandar dalam proses pelaksanaannya. Penjaminan mutu diperlukan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan pendidikan dapat terjamin kualitas pelayanannya sehingga pendidikan mampu memberikan kontribusi sebagaimana yang diharapkan.

Lantas, apa penjaminan mutu pendidikan? Dalam beberapa literatur penjaminan mutu merupakan bagian dari manajemen mutu untuk memberikan keyakinan bahwa kualitas yang dipersyaratkan akan terpenuhi. “All the planned and systematic activities implemented within the quality system that can be demonstrated to provide confidence that a product or service will fulfill requirements for quality”, demikian disebutkan. Penjaminan mutu pendidikan dimaksudkan sebagai serangkaian aktivitas yang terencana secara sistematis dan berkelanjutan untuk memberikan keyakinan bahwa standar kualitas yang dipersyarakat

<sup>11</sup> Ali Imron. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008: 18.

dalam pendidikan akan dipenuhi. Oleh karena itu, penjaminan mutu mengacu pada monitoring, evaluasi, atau review terhadap pendidikan terutama untuk memantapkan keyakinan *stakeholder* bahwa ekspektasi atau standar minimunnya terpenuhi.<sup>12</sup>

Berkenaan dengan penjaminan mutu pendidikan, setidaknya terdapat lima lingkup yang perlu diperhatikan dalam penjaminan mutu pendidikan termasuk dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu:

1. Kualitas pembelajar (*quality of learners*);
2. Kualitas lingkungan belajar (*quality of Learning environments*);
3. Kualitas isi pembelajaran (*quality of contents*);
4. Kualitas proses belajar (*Quality of processes*); dan
5. Kualitas hasil belajar (*Quality of Outcomes*).<sup>13</sup>

Kebijakan penjaminan mutu pendidikan, dengan demikian, apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan terkait dengan penjaminan mutu pendidikan. Kalau kita mengadaptasi definisi kebijakan pendidikan yang dikemukakan oleh HAR Tilaar dan Riant Nugroho bahwa kebijakan pendidikan adalah “keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat”,<sup>14</sup> maka kebijakan penjaminan mutu pendidikan dapat dimaknai:

Keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis penjaminan mutu pendidikan dalam berbagai aspeknya baik pembelajar, lingkungan belajar, isi pembelajaran, proses pembelajaran, maupun hasil pembelajaran untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat.

#### D. Falsafah Kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Falsafah kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi dimaksudkan sebagai pemikiran filosofis yang mendasari kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi. Kalau kita mengacu pada pemahaman kebijakan Dye sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka falsafah kebijakan penjaminan mutu perguruan

12 Michael L. Skolnik. *Op.Cit.* hlm. 71.

13 Unicef. “Defining Quality in Education” *Work Paper*, 2000, hlm. 4.

14 HAR Tilaar dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 140.

tinggi dimaksudkan sebagai apa yang mendasari pemerintah untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu keputusan dalam rangka penjaminan mutu perguruan tinggi. Pendasaran rasionalitas atas suatu pilihan atau keputusan pemerintah itulah yang menjadi *concern* falsafah kebijakan. Tidak heran jika Solichin A. Wahab, misalnya, menyebutnya sebagai *metapolicy*.

Sebagai *metapolicy*, falsafah kebijakan tentu tidak terjebak dalam perdebatan teknis administratif kebijakan tetapi lebih pada upaya mengungkapkan rasionalitas kebijakannya. Rasionalitas apa yang mendasari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para aktor kebijakan. Tatkala STAIN Malang berubah status kelembagaan menjadi UIN Malang, maka falsafah kebijakan *concern* untuk menggali rasionalitas yang mendasari atau mendorong lahirnya kebijakan tersebut.<sup>15</sup> Demikian juga tatkala beberapa perguruan tinggi Islam negeri mentransformasikan kelembagaannya menjadi *world class university* (WCU), falsafah kebijakan mengkaji pada aspek *metapolicy*-nya yaitu apa yang menjadi dasar pemikiran pilihan kebijakan tersebut.<sup>16</sup> Begitu juga dengan lahirnya kebijakan perubahan beberapa PTN yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Rasionalitas munculnya berbagai macam kebijakan penjaminan mutu di perguruan tinggi akhir-akhir ini disebabkan oleh beberapa alasan. Hayward mengidentifikasi beberapa hal yang melatarbelakangi kebijakan penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu: pengembangan SDM (*Issues of Human Capacity*), peningkatan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi (*Issues of Financial Capacity and Economic Growth*), adanya pemeringkatan perguruan tinggi (*Issues of University Ranking*), dan perubahan teknologi (*Issues of Technological Change*).<sup>17</sup>

Sedikit berbeda dengan Hayward, Azra dengan mendasarkan pada kerangka Brent D. Ruben menjelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa hal yang mendorong Perguruan Tinggi mengembangkan keunggulan (*excellence*) di era sekarang ini, yaitu:

15 Kajian semacam ini dapat dilihat misalnya dalam Muhammad In'am Esha, "Universitasasi STAIN Malang: Analisis Kebijakan Publik Perubahan Kelembagaan Dalam Perspektif Filosofat Nilai" *Jurnal Ulul Albab* Volume 13 No. 1 Tahun 2012.

16 Lihat misalnya Muhammad In'am Esha (ed). *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Menuju World Class University*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

17 Fred M. Hayward. " Quality Assurance and Accreditation of Higher Education in Africa" Paper at the Conference on Higher Education Reform in Francophone Africa: Understanding the Keys of Success June 13-15, 2006 Ouagadougou, Burkina Faso.

*Pertama*, meningkatkan apresiasi publik terhadap Perguruan Tinggi. Kebijakan penjaminan mutu dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan dalam upaya pemenuhan harapan *stakeholders*;

*Kedua*, mengembangkan relevansi Perguruan Tinggi dengan dunia kerja. Perguruan Tinggi senantiasa berusaha agar seluruh proses pengajaran dan pendidikan memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Semakin kecil relevansinya dengan dunia kerja dan lingkungan, semakin sulit menjadi Perguruan Tinggi unggul baik nasional maupun internasional.

*Ketiga*, Perguruan Tinggi menjadi lembaga keilmuan yang lebih efektif. Perguruan tinggi merupakan medan transformasi pengetahuan, nilai, dan keterampilan (*skill*). Oleh karena itu efektivitas dalam pengelolaannya senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu.

*Keempat*, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak di masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas perguruan tinggi. Terlebih, di era globalisasi yang meniscayakan saling ketergantungan antarlembaga. Penguatan dan perluasan kerjasama di masyarakat menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

*Kelima*, pengembangan SDM untuk melahirkan kepemimpinan (*leadership*) dan penguatan kerangka visi keunggulan baik keunggulan akademis (*academic excellence*) maupun keunggulan pelayanan (*service excellence*) di perguruan tinggi.<sup>18</sup>

Berbagai pemikiran di atas, tidak dapat dilepaskan dari peran yang diemban perguruan tinggi. Tatkala UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengembangkan kebijakan menjadi perguruan tinggi yang berkelas internasional (*world class university*) setidaknya terdapat tiga pertimbangan yang mendasarinya yaitu: (1) pertimbangan keislaman, (2) pertimbangan kebangsaan, dan (3) pertimbangan kelembagaan.<sup>19</sup>

---

18 Azyumardi Azra. "Menuju *world class university (WCU)*" Paper. Disampaikan pada *International Conference on 'Quality Islamic Education'* Jakarta, 24-26 November 2014. Lihat juga Brent D. Ruben et.al. *Pursuing Excellence in Higher Education*. San Francisco: John Wiley & Sons, 2004. [www.amazon.com](http://www.amazon.com). diakses 23 November 2016 Pukul 22.44 WIB.

19 Muhammad In'am Esha (ed). *Op.Cit.* hal. 1-11.

Pertimbangan keislaman (*islamity*) dimaksudkan bahwa kebijakan menjadi kampus bertaraf internasional tidak dapat dilepaskan dari pemikiran dan upaya untuk mewujudkan visi besar Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*.

Orientasi UIN Maliki Malang menjadi salah satu PTIN yang berkelas internasional agar nilai-nilai keislaman universal dapat disemaikan ke relung-relung batin anak bangsa dari berbagai belahan dunia. Ajaran Islam adalah ajaran yang universal. Ajaran yang membawa rahmat bagi semesta (*rahmatanlil>alamin*). Karenanya, perguruan tinggi yang mengajarkan dan menyemaikan nilai-niai tersebut adalah perguruan tinggi yang berorientasi universal atau global.<sup>20</sup>

Pertimbangan kebangsaan (*nationality*) didasarkan pada pemikiran bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan problem-problem kebangsaan yang saat ini dihadapi seperti peningkatan kualitas SDM, pengembangan hasil-hasil riset yang bermanfaat dalam pembangunan bangsa, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bonus demografi yang dimiliki bangsa kita ini tentu harus dijadikan kekuatan pengubah dunia secara umum dan dunia Islam pada khususnya. Logikanya sederhana. Tatkala kita mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul, maka kontribusi Indonesia bagi dunia Islam secara otomatis akan dapat dirasakan secara nyata. Indonesia ibaratnya menjadi miniatur dunia Islam saat ini. Di sinilah tugas berat bangsa Indonesia yang harus bisa dijawab dengan langkah-langkah strategis dan nyata.

Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan sumberdaya manusia unggul secara terus-menerus seiring dengan perkembangan dan kebutuhan zaman melalui pendidikan tinggi yang berkualitas unggul. Ini adalah sebuah keharusan sejarah. Terlebih, saat ini masyarakat dunia telah menjadi masyarakat pengetahuan (*knowledge society*).<sup>21</sup>

Sedangkan, pertimbangan kelembagaan (*institutionality*) tidak lain karena pengembangan perguruan tinggi berkelas internasional merupakan cita-cita yang hendak diwujudkan sesuai dengan Renstra Pengembangan Universitas 25 Tahun Ke Depan.

---

20 Muhammad In'am Esha (ed). *Ibid.* hal. 4.

21 Muhammad In'am Esha (ed). *Ibid.* hal. 6-7.

... alasan fundamental secara kelembagaan mengapa kampus ini diorientasikan menjadi perguruan tinggi berkelas internasional tidak lain kesesuaiannya dengan Rencana Strategis Pengembangan yang telah dibuat. Ada alasan filosofis kelembagaan yang menjadi kekuatan pendorong perubahan demi perubahan di kampus ini yaitu semangat untuk menjadikan lembaga ini sebagai pusat keunggulan dan pusat peradaban Islam (*the center of excellence and islamic civilization*).<sup>22</sup>

Demikianlah beberapa pemikiran identifikasi rasionalitas yang mendorong pengambilan keputusan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Dalam pandangan penulis, beberapa pemikiran di atas dapat diklasifikasikan dalam 5 (lima) aspek pertimbangan yang bisa kita sebut sebagai "Pancamatra" yaitu: (1) matra pertimbangan ideologis; (2) matra pertimbangan politik; (3) matra pertimbangan ekonomi; (4) matra pertimbangan manajerial; dan (5) matra Pertimbangan sosial-budaya.

Kelima matra tersebut setidaknya dapat membantu memetakan secara garis besar hal-hal yang menjadi pendasaran rasional munculnya kebijakan pendidikan termasuk dalam konteks ini kebijakan penjaminan mutu. Tentu hal ini tidak akan dapat mencakup seluruh realitas yang ada dalam realitas kebijakan. Akan tetapi matra-matra ini setidaknya memudahkan kita dalam melakukan analisis dalam melakukan kajian terkait dengan *philosophical based of education policy*.

## E. Penutup

Kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan bagian dari salah satu kebijakan pendidikan. Kebijakan sebagai sebuah objek, ia dapat dikaji dalam beberapa aspek seperti sosiologi kebijakan, sejarah kebijakan, politik kebijakan, filsafat kebijakan dan seterusnya. Hal ini sama tatkala kita menjadikan pendidikan sebagai objek kajian dapat dilihat dalam beberapa aspeknya seperti sejarah pendidikan, politik pendidikan, sosiologi pendidikan, filsafat pendidikan, dan seterusnya.

Oleh karena itu, gagasan tulisan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang tidak mungkin jika kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan, dikaji dalam perspektif filsafat. Memang harus diakui perlu kajian khusus baik secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk

---

22 Muhammad In'am Esha, *Ibid.* 12.

menjadikan filsafat kebijakan menjadi sebuah disiplin ilmu. Hal itu tidak menjadi *concern* dalam tulisan ini. Tulisan ini hanya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa kebijakan sebagai sebuah praktik kebijakan (realitas kebijakan) tidak dapat dilepaskan dari pendasarannya rasional (*rationality of policy*) yang dalam konteks ini secara mudah kita sebut sebagai falsafah kebijakan. [\*]

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. "Menuju *world class university (WCU)*" Paper. Disampaikan pada *International Conference on 'Quality Islamic Education'* Jakarta, 24-26 November 2014.
- Bertens, Kes. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999, hal. 17.
- Dye, Thomas. *Policy Analysis*. Alabama: The University of Alabama Press. 1972.
- Esha, Muhammad In'am. *Menuju Pemikiran Filsafat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Esha, Muhammad In'am (ed). *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Menuju World Class University*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Hardiman, F. Budi. *Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 2010, hal. 3.
- Hayward, Fred M." Quality Assurance and Accreditation of Higher Education in Africa" Paper at the Conference on Higher Education Reform in Francophone Africa: Understanding the Keys of Success June 13-15, 2006 Ouagadougou, Burkina Faso.
- Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 16.
- Imron. Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008: 18.
- Islamy. M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Muhammad In'am Esha, "Universitasasi STAIN Malang: Analisis Kebijakan Publik Perubahan Kelembagaan Dalam Perspektif illsafat Nilai" *Jurnal Ulul Albab* Volume 13 No. 1 Tahun 2012.

Prof. Dr. H. Muhammin, MA, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Ruben, Brent D. *Pursuing Excellence in Higher Education*. San Francisco: John Wiley & Sons, 2004. www. amazon.com. diakses 23 November 2016 Pukul 22.44 WIB.

Skolnik. Michael L. "Quality Assurance in Higher Education as a Political Process". *Journal of Higher Education Management and Policy*. Vol. 22/1, 2010. Hlm. 69.

Tilaar, HAR dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 140.

Unicef. "Defining Quality in Education" *Work Paper*, 2000, hlm. 4.

Wahab. Prof. Solichin A. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005: 4.[\*]